

BAB II

PERKEMBANGAN JCPOA & DINAMIKA KEIKUTSERTAAN AMERIKA SERIKAT DI JCPOA

Pada bab dua ini, penulis akan menjelaskan lebih detail mengenai apa itu perjanjian JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) dan bergabungnya Amerika Serikat dalam negosiasi tersebut pada masa pemerintahan presiden Barack Obama. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian JCPOA itu sendiri, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya perjanjian JCPOA, siapa saja negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan JCPOA, tujuan dibentuknya perjanjian JCPOA, dan apa saja program-program yang akan dijalankan dalam negosiasi ini. Setelah membicarakan mengenai perjanjian JCPOA secara detail, kemudian penulis akan membahas mengenai keikutsertaan Amerika Serikat dalam perjanjian JCPOA ini. Dimana Amerika Serikat resmi mulai memutuskan untuk bergabung dalam JCPOA pada masa pemerintahan presiden Barack Obama di tahun 2015. Penulis akan menjelaskan bagaimana proses bergabungnya Amerika Serikat dalam perjanjian JCPOA dan kepentingan apa yang dimiliki Obama dibalik keputusan tersebut.

A. Perkembangan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action)

Perkembangan JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) ini akan dimulai dari penjelasan sejarah awal terbentuknya negosiasi ini, bagaimana ide kerjasama ini bisa teretuskan. Perjanjian JCPOA ini tentunya tidak begitu saja terbentuk, dibutuhkan peran dari negara-negara untuk mempersatukan keinginan yang sama menjadi sebuah perjanjian kerjasama yang menguntungkan diantara sesama anggotanya. Pembentukan JCPOA ini juga mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dengan bidang-bidang kerjasama yang beragam yang diatur di dalamnya.

1. Latar Belakang Berdirinya JCPOA

Perang dunia kedua yang menggunakan senjata atom telah membuat masyarakat internasional khawatir. Hal ini dikarenakan dampak dari senjata pemusnah massal ini

sangatlah berbahaya dan merusak. Pasca perang dunia kedua ini masyarakat sangat mengecam negara-negara yang telah mengembangkan senjata pemusnah masal ini. Salah satu negara yang menjadi sorotan masyarakat internasional adalah Iran. Iran telah memulai program nuklirnya sejak 1950-an saat Presiden Iran Shah Palevi menjabat. Program nuklir ini dibuat atas prakarsa dari presiden Amerika Serikat yang mana mencanangkan program “*Atom for Peace*” dalam pidatonya disidang PBB. Pada tahun 1968 Iran menyepakati *non-proliferation treaty* dengan beberapa negara lainnya yang mempunyai program nuklir. Saat Shah Palevi menjadi presiden hubungan Amerika Serikat dan Iran sangatlah mesra. Bahkan Amerika Serikat membantu Iran dalam mengembangkan program nuklirnya. Namun tahun 1979 terjadi Revolusi Iran, Shah Palevi digulingkan dan program nuklir Iran yang telah dikembangkan berantakan karena banyak talenta nuklir Iran melarikan diri dari negara tersebut setelah Revolusi. Pemimpin Iran yang menggantikan Shah Palevi adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Saat itu Ayatollah Ruhollah Khomeini memberhentikan program nuklir tersebut sampai tahun 1988(NTI, 2014).

Pada akhir 1980-an Iran mengaktifkan kembali program nuklirnya, dengan bantuan dari Pakistan (yang menandatangani perjanjian bilateral dengan Iran pada 1992), China pada 1990, dan Rusia pada 1992 dan 1995, dan dari AQ Jaringan Khan. Iran mulai mengejar kemampuan siklus bahan bakar nuklir asli dengan mengembangkan infrastruktur penambangan uranium dan bereksperimen dengan konversi dan pengayaan uranium(NTI, 2014). Bantuan-bantuan ini membuat program nuklir Iran semakin maju dan berkembang. Menurut Nuclear Threat Initiative, Badan-badan intelijen Amerika Serikat telah lama mencurigai Iran menggunakan program nuklir sipilnya sebagai kedok untuk pengembangan senjata pemusnah masal. Dan Iran berlaku sebaliknya, Iran selalu mengatakan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk pengetahuan dan energy(BBC News, 2015).

Pada Agustus 2002, *National Council of Resistance of Iran* yang berpusat di Paris mendapat informasi dari sebuah kelompok pembangkang Iran yang mana secara terbuka mengungkapkan keberadaan dua fasilitas nuklir yang tidak diumumkan oleh pemerintah Iran yaitu fasilitas produksi air berat Arak, dan fasilitas pengayaan Natanz. Pada Februari 2003, Presiden Iran Mohammad Khatami mengakui keberadaan fasilitas tersebut dan menyatakan bahwa Iran telah melakukan percobaan pengayaan skala kecil untuk menghasilkan uranium yang diperkaya rendah untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (NTI, 2014). Pada akhir Februari, inspektur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengunjungi Natanz. Pada Mei 2003 Iran mengizinkan inspektur IAEA untuk mengunjungi Perusahaan Listrik Kalaye tetapi menolak untuk mengizinkan mereka mengambil sampel, dan sebuah laporan IAEA bulan berikutnya menyimpulkan bahwa Iran gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian sebelumnya (Lyons, 2015).

Pada Juni 2003 Iran dihadapkan dengan prospek dirujuk ke Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan negosiasi diplomatik dengan Prancis, Jerman, dan Inggris (UE 3). Amerika Serikat menolak untuk terlibat dalam negosiasi ini. Pada Oktober 2003 Deklarasi Teheran dicapai antara Iran dan UE -3, di bawah deklarasi ini Iran setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan IAEA serta menandatangani Protokol Tambahan. Dan untuk sementara waktu Iran menanggihkan semua pengayaan uraniumnya (Lyons, 2015). Pada bulan September dan Oktober 2003 IAEA melakukan beberapa inspeksi fasilitas. Ini diikuti oleh Perjanjian Paris pada bulan November 2004, di mana Iran setuju untuk sementara menanggihkan kegiatan pengayaan dan konversi, termasuk pembuatan, pemasangan, pengujian, dan pengoperasian sentrifugal. Dan Iran berkomitmen untuk bekerja sama dengan EU-3 untuk menemukan satu sama lain solusi diplomatik jangka panjang yang bermanfaat (NTI, 2018).

Pada Agustus 2005 Mahmoud Ahmadinejad, seorang garis keras terpilih sebagai presiden Iran. Dia menuduh negosiator Iran yang telah menegosiasikan Paris Accords adalah pengkhianat. Dua bulan kemudian perjanjian dengan EU-3 berantakan. Setelah itu EU-3 mengajukan proposal jangka panjang namun gagal. Hal ini dikarenakan pemerintah Iran merasa bahwa proposal itu berat pada tuntutan namun ringan pada insentif, tidak memasukkan proposal Iran, dan melanggar Perjanjian Paris. Iran memberi tahu IAEA bahwa mereka akan melanjutkan konversi uranium di Esfahan (NTI, 2014). Pada bulan Februari 2006 Iran mengakhiri implementasi sukarela dari Protokol Tambahan dan melanjutkan pengayaan di Natanz, mendorong Dewan Gubernur IAEA untuk merujuk Iran ke Dewan Keamanan PBB. Setelah pemungutan suara, Iran mengumumkan akan melanjutkan pengayaan uranium. Pada bulan April 2006 Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran memiliki teknologi nuklir tetapi mengatakan bahwa itu murni untuk pembangkit listrik, bukan senjata (Lyons, 2015).

Pada Juni 2006 EU 3 bergabung dengan China, Rusia, dan Amerika Serikat, untuk membentuk P5 +1. Bulan berikutnya, Juli 2006, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pertamanya yang menuntut Iran menghentikan pengayaan dan pemrosesan uranium. Resolusi tersebut menuntut agar Iran menghentikan kegiatan pengayaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, termasuk larangan transfer teknologi nuklir dan rudal ke negara itu dan membekukan aset individu dan entitas Iran tertentu untuk menekan negara (Lyons, 2015).

Tetapi dalam Resolusi 1803 dan di tempat lain Dewan Keamanan juga mengakui hak-hak Iran berdasarkan Pasal IV NPT, yang memberikan hak yang tidak dapat dicabut untuk mengembangkan penelitian, produksi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Pada September 2009 Presiden AS Barack Obama mengungkapkan keberadaan fasilitas pengayaan bawah tanah di Fordow, dekat Qom. Keputusan Iran untuk membangun lagi fasilitas nuklir tanpa memberi tahu IAEA merupakan tantangan langsung ke

pangkalan dasar di pusat negara non-Amerika. Hal ini membuat Israel merasa terancam sehingga Israel mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran apabila tidak adanya tindakan dari Dewan Keamanan (Lyons, 2015).

Ketegangan semakin memuncak ketika Iran berkali-kali menolak berpartisipasi aktif dalam negosiasi mengenai program nuklir. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan komunitas internasional telah melakukan mobilisasi untuk mencegah Iran yang bersenjata nuklir, percaya bahwa senjata nuklir di tangan rezim Iran akan secara langsung mengancam Israel, membuat wilayah itu tidak stabil, dan menimbulkan risiko keamanan bagi Amerika Serikat, Eropa, dan sekutu lainnya. Iran yang bersenjata nuklir merupakan ancaman langsung terhadap sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah. Israel paling berisiko karena para pemimpin Iran telah berulang kali menyatakan bahwa Israel harus dihapus dari peta. Sekutu-sekutu Arab Amerika, seperti Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan lainnya sangat khawatir dengan kebijakan regional Iran yang agresif dan akan merasa semakin terancam oleh Iran yang bersenjata nuklir ("The Iranian Nuclear Threat: Why it Matters," n.d.).

Postur militer Iran telah menyebabkan peningkatan pembelian senjata oleh para tetangganya, dan Iran yang bersenjata nuklir kemungkinan akan memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah yang selanjutnya akan mengacaukan kawasan yang bergejolak dan vital ini. Amerika Serikat dan komunitas internasional memiliki kepentingan untuk menjaga ketenangan di Timur Tengah. Hal ini disebabkan Amerika masih sangat bergantung terhadap Timur Tengah. Bahkan ketika Amerika Serikat baru-baru ini menjadi pengekspor minyak netto, ekonominya tetap sangat bergantung pada stabilitas pasar minyak internasional, yang masih membutuhkan ekspor minyak terus menerus dari Timur Tengah ("The Iranian Nuclear Threat: Why it Matters," n.d.).

Iran yang bersenjata nuklir kemungkinan akan semakin memperkuat kebijakan luar negeri Iran yang

agresif, termasuk keterlibatannya yang dalam di Suriah, serangannya terhadap Israel melalui proksi termasuk Hezbollah, Hamas dan kelompok teroris lainnya, dan sponsornya dari pemberontak pemberontak di Yaman. Memiliki senjata nuklir akan memberanikan agresi ini dan kemungkinan akan menghasilkan konfrontasi yang lebih besar dengan komunitas internasional. Iran sudah memiliki kemampuan senjata konvensional untuk menyerang Amerika Serikat dan pasukan sekutu yang ditempatkan di Timur Tengah dan beberapa bagian Eropa. Jika Teheran diizinkan mengembangkan senjata nuklir, ancaman yang ditimbulkannya akan meningkat secara dramatis. Oleh karena itu negara P5+1 sepakat untuk membuat suatu perjanjian untuk mengatasi perkembangan nuklir Iran yang kian hari semakin agresif (Posen, B., Rubin, B., Lindsay, J., & Takeyh, 2010).

Pada Maret 2013 Amerika Serikat memulai serangkaian pembicaraan bilateral rahasia dengan para pejabat Iran di Oman, dipimpin oleh William Joseph Burns dan Jake Sullivan di pihak Amerika dan Ali Asghar Khaji di pihak Iran (Rozen, 2014). Pada Juni 2013, Hassan Rouhani terpilih sebagai presiden Iran (Labott, Castilo, & Shoichet, 2015). Rouhani telah digambarkan lebih moderat, pragmatis dan bersedia bernegosiasi daripada Ahmadinejad. Pada Agustus 2013, tiga hari setelah pelantikannya, Rouhani menyerukan dimulainya kembali negosiasi serius dengan P5 +1 pada program nuklir Iran. Pada September 2013 Obama dan Rouhani berbicara melalui telepon, kontak tingkat tinggi pertama antara pemimpin AS dan Iran sejak 1979, dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry bertemu dengan menteri luar negeri Iran Mohammad Javad Zarif, menandakan bahwa kedua negara terbuka untuk kerja sama (Davenport, 2019).

Setelah beberapa putaran negosiasi, pada 24 November 2013, Joint Plan of Action, perjanjian sementara mengenai program nuklir Iran, ditandatangani antara Iran dan negara-negara P5 +1 di Jenewa, Swiss. Itu terdiri dari pembekuan jangka pendek bagian-bagian dari program nuklir Iran dengan imbalan pengurangan sanksi ekonomi

terhadap Iran, ketika negara-negara itu bekerja menuju kesepakatan jangka panjang (Gearan & Warrick, 2013). IAEA mulai inspeksi yang lebih intrusif dan sering di bawah perjanjian sementara ini. Perjanjian ini secara resmi diaktifkan pada 20 Januari 2014. Pada hari itu, IAEA mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa Iran mematuhi ketentuan perjanjian sementara, termasuk menghentikan pengayaan uranium hingga 20 persen, memulai proses pengenceran untuk mengurangi setengah dari persediaan 20 persen pengayaan uranium yang diperkaya menjadi 3,5 persen, dan menghentikan pekerjaan pada reaktor air berat Arak (Dahl & Pawlak, 2014). Setelah bertahun-tahun melakukan negosiasi dan diplomasi tercapailah negosiasi yaitu *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* (Posen, B., Rubin, B., Lindsay, J., & Takeyh, 2010).

2. Negara Anggota JCPOA

Negara anggota JCPOA adalah negara P5+1 yang mengacu pada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (P5); yaitu Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat; ditambah Jerman bersama dengan Uni Eropa. P5 +1 sering disebut sebagai E3 + 3 oleh negara-negara Eropa. Ini adalah kelompok enam kekuatan dunia yang, pada tahun 2006, bergabung bersama dalam upaya diplomatik dengan Iran terkait dengan program nuklirnya.

Tabel 2. 1 Negara Anggota JCPOA 1

Negara	Anggota Tetap DK PBB	Anggota Uni Eropa
 Amerika Serikat	✓	
 Britania Raya	✓	✓
 Jerman		✓
 Prancis	✓	✓
 Republik Rakyat Tiongkok	✓	
 Federasi Rusia	✓	

Jerman tidak termasuk anggota tetap dewan keamanan PBB dan tidak memiliki hak veto, tetapi Jerman adalah salah satu mitra dagang utama Iran sehingga diikutkan dalam proses negosiasi. Jerman adalah mitra dagang utama Iran. Program nuklir Iran terutama tergantung pada produk dan layanan Jerman. Misalnya, ribuan sentrifugal yang digunakan untuk memperkaya uranium dikendalikan oleh perangkat keras dan perangkat lunak otomasi serba guna oleh Siemens (Jones, 2007). Sekitar 50 perusahaan Jerman memiliki kantor cabang di Iran, dan lebih dari 12.000 perusahaan memiliki perwakilan perdagangan di Iran. Banyak perusahaan Jerman yang terkenal terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur utama Iran, terutama di sektor petrokimia, seperti Linde, BASF, Lurgi, Krupp, Siemens, ZF Friedrichshafen, Mercedes, Volkswagen dan MA (Zetter, n.d.).

Pada 2005, Jerman memiliki pangsa pasar ekspor Iran terbesar dengan \$ 5,67 miliar (14,4%) (Payvand News, n.d.). Pada 2008, ekspor Jerman ke Iran meningkat 8,9 persen dan mencakup 84,7 persen dari total volume perdagangan Jerman-Iran. Volume perdagangan bilateral keseluruhan hingga akhir September 2008 mencapai 3,23 miliar euro, dibandingkan dengan 2,98 miliar euro pada tahun sebelumnya. Nilai perdagangan antara Jerman dan Iran meningkat dari sekitar 4,3 miliar euro pada 2009 menjadi hampir 4,7 miliar euro pada 2010 (Agency, 2011)

Pada Juni 2006, Cina, Rusia, dan Amerika Serikat bergabung dengan tiga negara UE-3, yang telah bernegosiasi dengan Iran sejak 2003, untuk menawarkan proposal lain untuk negosiasi komprehensif dengan Iran. Putaran pembicaraan antara Iran dan P5 +1, yang diketuai oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa Catherine Ashton, diadakan di kota Kazakh, Almaty pada 26-27 Februari 2013. Kedua pihak sepakat untuk bertemu lagi pada 5-6 April untuk melanjutkan pembicaraan setelah mengadakan pembicaraan tingkat ahli di kota Istanbul Turki pada 17-18 Maret 2013 (Norman & Solomon, 2004). Dalam pertemuan lebih lanjut dari P5 +1 di Jenewa pada 16 Oktober 2013, Iran

menyatakan bahwa mereka dapat mengizinkan kunjungan mendadak ke situs nuklirnya sebagai langkah terakhir dalam proposal untuk menyelesaikan perbedaan dengan Barat. Pada 24 November 2013, perjanjian sementara dicapai antara negara-negara E3 / EU + 3 (P5 +1 dan UE) dan Iran di Jenewa, Swiss(Reynold, 2013).

Hal ini diperkirakan akan menyebabkan pembekuan enam bulan dan pengembalian sebagian dari program nuklir Iran sebagai imbalan atas penurunan sanksi ekonomi terhadap Iran, ketika negara-negara tersebut bekerja menuju perjanjian jangka panjang. Ini merupakan perjanjian formal pertama antara Amerika Serikat dan Iran dalam 34 tahun(CNN Staff, 2013).Kesepakatan kerangka kerja tersebut diwujudkan dalam sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Layanan Tindakan Eksternal Eropa UE berjudul Pernyataan Bersama oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif Switzerland, dan dalam dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS berjudul Parameter untuk Rencana Aksi Komprehensif Gabungan Mengenai Republik Islam Iran tentang Program Nuklir(“Nuclear Agreement,” 2018).

3. Tujuan Dibentuknya JCPOA

Dibentuknya JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) ini tentunya memiliki tujuan yang jelas dan memberikan berbagai keuntungan bagi negara-negara anggotanya. JCPOA merupakan perjanjian kerjasama dalam hal perjanjian nuklir yang bertujuan untuk mengatur program nuklir Iran dengan imbalan yaitu pencabutan sanksi ekonomi Iran. Tujuan pengaturan ulang nuklir Iran ini yaitu untuk mengurangi bahan-bahan yang berpotensi untuk pembuatan senjata nuklir. Dengan adanya JCPOA Iran membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan bahan fisil yang cukup(Belfer Center for Science and International Affairs, 2015). Yang mana kita ketahui sebelum adanya JCPOA, komunitas internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Iran.

Uni Eropa telah menerapkan embargo minyak dan sanksi nuklir Amerika Serikat yaitu pembatasan ekonomi yang dikenakan pada entitas di bawah yurisdiksi Amerika Serikat (Sanksi Utama) dan pembatasan entitas di luar yurisdiksi Amerika Serikat (Sanksi Sekunder). Sanksi Sekunder mengancam entitas non-Amerika Serikat dengan keterbatasan akses mereka ke pasar Amerika Serikat jika mereka bertransaksi dengan berbagai entitas Iran. Secara luas, Sanksi Sekunder memaksa entitas non-Amerika Serikat untuk memutuskan apakah mereka akan berurusan dengan Iran atau dengan Amerika Serikat. Mereka tidak bisa melakukan keduanya (Clients, 2018).

Tujuan lain dari JCPOA yaitu untuk transparansi program nuklir Iran. Hal ini berguna untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahwa Iran dapat mengembangkan senjata nuklir secara rahasia di lokasi yang tidak diumumkan. Pertimbangan lain dari perjanjian ini, jika melihat konteks berlangsungnya perjanjian adalah kemampuan Iran untuk memproduksi minyak dalam jumlah besar yang mencapai 2 juta barel per hari diharapkan akan mampu menjadi mitra bagi Amerika yang membutuhkan suplai energi dalam jumlah lebih besar, sekaligus mengimbangi pengaruh Rusia yang begitu kuat terhadap Iran (Rofii, 2015).

Dalam satu dekade terakhir, Iran tidak memiliki akses pasar yang kuat karena terhalang oleh embargo negara-negara Barat. Pada saat bersamaan Iran tidak memiliki teknologi mutakhir dalam eksplorasi minyak sehingga ekspektasi untuk mengambil minyak dalam jumlah besar tidak pernah tercapai. Jika proses perjanjian berjalan lancar, sejumlah pihak terutama perusahaan Amerika dan Inggris yang bergerak di bidang perminyaaan seperti Shell, Chevron dan British Petroleum berharap bisa ikut ambil bagian dalam proyek eksplorasi minyak dan gas Iran. Dengan ekspektasi teknologi baru dari Barat bisa memberikan sumbangsih 3,3 juta barel per hari untuk minyak Iran. Skenario para pengusaha Amerika dan Eropa sangat realistis dengan kepemilikan cadangan minyak Iran, sementara Iran sangat

membutuhkan teknologi dan dukungan Barat untuk menjangkau pasar internasional(Rofii, 2015).

4. Ketentuan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action)

JCPOA menempatkan kendala pada program pengayaan air dan reaktor air berat Iran dan mencakup ketentuan pemantauan yang dirancang untuk mendeteksi upaya Iran untuk memproduksi senjata nuklir baik menggunakan fasilitas yang dinyatakan atau tertutup. Ketentuan terkait nuklir dari perjanjian itu, menurut para pejabat Amerika Serikat, memperpanjang jumlah waktu yang diperlukan Iran untuk menghasilkan HEU tingkat senjata yang cukup untuk satu senjata nuklir hingga minimum satu tahun, untuk durasi minimal 10 tahun. Selain pembatasan kegiatan yang berkaitan dengan produksi bahan fisil, JCPOA tanpa batas melarang Iran kegiatan yang dapat berkontribusi pada desain dan pengembangan alat peledak nuklir, termasuk penelitian dan kegiatan diagnostik. Sebuah laporan IAEA pada 16 Januari 2016, menyatakan bahwa Iran telah memenuhi persyaratan untuk Hari Pelaksanaan yang ditetapkan di bawah ini(Kerr, Paul K.; Katzman, 2018).

a. Ketentuan Pengayaan

JCPOA membatasi pengayaan uranium Iran untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh P5+1. Perjanjian tersebut mengharuskan IAEA untuk menyatakan bahwa Iran telah menyelesaikan sebagian besar tugas yang dijelaskan di bawah ini agar Teheran memenuhi syarat untuk bantuan sanksi Hari Pelaksanaan. Menurut JCPOA, berakhirnya pembatasan pengayaan JCPOA akan diikuti oleh evolusi bertahap, pada kecepatan yang wajar dari program pengayaan Iran. Iran telah menyerahkan rencana pengayaan R&D ke IAEA sebagai bagian dari Deklarasi awal Teheran untuk Protokol Tambahannya. Ketaatan Iran terhadap rencana itu adalah persyaratan JCPOA.

- 1) Batasan Centrifuge (10 tahun). Selama 10 tahun, Teheran akan menggunakan tidak lebih dari 5.060 sentrifugal IR-1 untuk memperkaya uranium, dan untuk menginstal hanya sentrifugal IR-1 di fasilitas

- tersebut. Semua kelebihan sentrifugal hanya dapat digunakan sebagai pengganti untuk pengoperasian sentrifugal dan peralatan yang rusak.
- 2) Tingkat Batasan Pengayaan (15 tahun). Selama setidaknya 15 tahun, Iran harus menahan diri dari memproduksi uranium yang diperkaya yang mengandung lebih dari 3,67% uranium²³⁵.
 - 3) Batasan Fasilitas (15 tahun). Selama 15 tahun, Iran akan memperkaya uranium hanya di fasilitas komersial Natanz dan tidak membangun fasilitas pengayaan baru.
 - 4) Batasan Timbunan LEU (15 tahun). Selama 15 tahun, Iran akan mempertahankan persediaan LEUnya tidak lebih dari 300 kilogram LEU yang mengandung 3,67% uranium²³⁵,⁴⁵(Collina, Davenport, Kimball, & Thielmann, 2015).

Komisi Gabungan yang didirikan JCPOA telah menganggap beberapa uranium yang diperkaya di Iran sebagai "*unrecoverable*" dan karena itu tidak dihitung terhadap batas JCPOA pada tumpukan uranium yang diperkaya Iran. Bahan yang dikecualikan tersebut termasuk LEU yang terkandung dalam limbah padat tingkat rendah dan LEU yang mengandung 3,67% uranium-235 dalam limbah cair dan lumpur tingkat rendah asalkan Iran tidak membangun atau mengoperasikan fasilitas apa pun atau bagian dari fasilitas yang mampu memulihkan Materi ini selama 15 tahun. Teheran akan menyimpan limbah ini di bawah perlindungan IAEA. Komisi itu juga menganggap uranium yang diperkaya mengandung 20% uranium²³⁵ yang digambarkan sebagai kontaminasi laboratorium(Kerr, Paul K.; Katzman, 2018).

Komisi mengumumkan pada 10 Januari 2017, bahwa mereka telah menyetujui rencana Iran untuk menghasilkan bubuk uranium dioksida dari LEU yang mengandung hingga 5% uranium-235,⁴⁷ Iran memiliki sekitar 100 kilogram bahan ini ketika Teheran dan P5 + 1 menyetujui JCPOA. LEU yang tersisa setelah Iran

menyelesaikan proses yang ditentukan, yang dimulai pemerintah pada 31 Januari 2017, akan dianggap "*unrecoverable*" dan tidak akan dihitung terhadap batas 300 kilogram yang dijelaskan di atas.

- 1) Konversi Fordow (15 tahun). Selama 15 tahun, Iran akan mempertahankan tidak lebih dari 1.044 sentrifugal IR-1 di fasilitas pengayaan Fordow. Iran tidak akan melakukan pengayaan uranium atau penelitian dan pengembangan terkait (R&D) di sana dan fasilitas itu tidak akan mengandung bahan nuklir. Iran setuju untuk mengubah Fordow menjadi pusat nuklir, fisika, dan teknologi. 348 dari sentrifugal IR-1 dapat digunakan untuk menghasilkan isotop yang stabil untuk keperluan medis dan industri.
- 2) Produksi Centrifuge (8, 10 tahun). Berkenaan dengan pembuatan centrifuge, Iran selama 10 tahun akan menggunakan kelebihan sentrifugal IR-1 dari fasilitas Natanz dan Fordow untuk penggantian mesin yang rusak. Teheran dapat melanjutkan memproduksi sentrifugal IR-1 jika stok sentrifugal penggantinya turun menjadi 500 atau di bawah. Setelah 8 tahun, Iran akan diizinkan untuk mulai memproduksi 2 jenis sentrifugal canggih; setelah 10 tahun, Iran akan diizinkan untuk memproduksi versi lengkap dari sentrifugal tersebut dan menyimpannya di bawah pengawasan IAEA sampai dibutuhkan untuk perakitan akhir.
- 3) *Research & Development (R&D) Centrifuge* (10 tahun). Selama 10 tahun, Iran harus menahan diri dari mengejar R&D pada teknologi apa pun selain pengayaan centrifuge gas (Iran State Government, 2015).

Reaktor Arak JCPOA berisi tentang komitmen Iran untuk mendesain ulang dan membangun kembali reaktor Arak berdasarkan desain yang disetujui oleh P5 +1, sehingga tidak akan menghasilkan plutonium tingkat senjata. Iran akan mengeksplor bahan bakar bekas dari

reaktor ini dan semua reaktor nuklir lainnya. JCPOA juga mengharuskan Teheran untuk membuat inti asli reaktor Arak tidak dapat dioperasikan. Laporan IAEA 16 Januari 2016, mengatakan bahwa Iran telah memenuhi persyaratan ini. Teheran mengelola proyek internasional untuk mendesain ulang dan membangun reaktor pengganti. Peserta P5 + 1 membentuk kelompok kerja untuk mendukung dan memfasilitasi perancangan ulang dan pembangunan kembali reaktor. Kelompok ini akan menyimpulkan dokumen resmi sebelum Hari Implementasi yang akan menentukan tanggung jawab yang diambil oleh para peserta P5 +1 (Kerr, Paul K.; Katzman, 2018)..

Otoritas Energi Atom China dan Departemen Energi Amerika Serikat menegaskan kesiapan mereka untuk bersidang dan mengepalai kelompok kerja, menurut sebuah pernyataan bersama 18 Oktober 2015 dari Cina, Iran, dan Amerika Serikat menambahkan bahwa ketiganya adalah pihak - pihak yang bermaksud untuk bekerja sama untuk menyimpulkan secara cepat dokumen yang dijelaskan di atas. Para pihak mengeluarkan dokumen pada 22 November 2015. Amerika Serikat tidak lagi berpartisipasi dalam proyek ini dan Inggris telah mengambil peran Amerika Serikat(Kerr, Paul K.; Katzman, 2018).

JCPOA melarang Iran memproses ulang bahan bakar reaktor bekas, kecuali untuk menghasilkan isotop radio untuk keperluan industri medis dan damai. JCPOA teks menyatakan bahwa Iran tidak bermaksud untuk terlibat dalam pemrosesan ulang setelah periode 15 tahun berakhir. Selain itu, Teheran juga berkomitmen untuk menahan diri dari menumpuk air berat di luar kebutuhan Iran. Iran akan menjual air berat yang tersisa di pasar internasional selama 15 tahun. JCPOA mengharuskan Iran untuk menahan diri dari membangun reaktor yang dikelola dengan air berat selama 15 tahun, dan Iran berjanji untuk menahan diri dari membangun

reaktor semacam itu tanpa batas(The White House Washington, n.d.).

Stok air berat Iran telah melebihi 130 metrik ton pada 2 kesempatan sejak JCPOA memulai implementasi. Pada 17 Februari 2016, IAEA memverifikasi bahwa persediaan air berat Teheran telah melebihi 130 metrik ton. Pada 8 November 2016, IAEA memverifikasi bahwa persediaan air berat Iran telah kembali melebihi batas JCPOA. Iran menyelesaikan masalah pada kedua kesempatan dengan mengeksport kelebihan air berat. Teheran telah mengirim bahan ini ke Rusia dan Amerika Serikat, mengirimkan setidaknya sebagian dari itu melalui Oman. Iran mengatakan kepada IAEA pada 18 Juni 2017 bahwa mereka telah mentransfer 19,1 metrik ton air berat ke tujuan di luar negara itu. Menurut laporan April 2018 yang mencakup 2017, kelebihan air berat Iran telah dijual dan dikirim ke pembeli internasional sisanya sedang menunggu penjualan dan disimpan di lokasi di luar Iran, di bawah segel IAEA, meskipun tetap milik Iran. IAEA memverifikasi pada 6 Mei 2018, bahwa Iran memiliki 120,3 metrik ton air berat(Kerr & Katzman, 2018).

b. Ketentuan Lain

Verifikasi

IAEA memantau kepatuhan Iran terhadap ketentuan JCPOA mengenai program pengayaannya dan program Arak, serta aktivitas terkait penggunaan senjata nuklir dua kali pakai. Untuk melakukannya, agensi telah meningkatkan jumlah inspektornya di Iran dan mulai menggunakan teknologi verifikasi modern yang lebih maju, seperti Monitor Pengayaan Online. Iran berjanji untuk mengizinkan Kehadiran IAEA jangka panjang di Iran dan telah setuju untuk mengimplementasikan Protokol Tambahan untuk perjanjian perlindungannya. Iran juga akan mengimplementasikan kode yang dimodifikasi 3.1 dari pengaturan anak perusahaan ke perjanjian perlindungan IAEA-nya. Menurut laporan IAEA, pemerintah telah mengambil langkah-langkah ini

sejak mulai menerapkan JCPOA pada Januari 2016(Iran State Government, 2015).

Iran menyerahkan deklarasi berdasarkan Protokol Tambahan pada Juli 2016. Perlu dicatat bahwa kewajiban perlindungan IAEA Iran berlangsung selama waktu yang tidak ditentukan. Potensi ekspor terkait nuklir ke Iran akan tetap tunduk pada pedoman ekspor Kelompok Pemasok Nuklir. Laporan Departemen Luar Negeri April 2018 mencatat bahwa Ketaatan Teheran terhadap komitmen JCPOA-nya akan menghambat kemampuannya untuk memproduksi senjata nuklir bahkan setelah ketentuan yang terikat waktu dari perjanjian berakhir, membantu memastikan bahwa program nuklirnya tetap damai secara eksklusif(The White House Washington, n.d.).

JCPOA juga menjelaskan pemantauan dan inspeksi lainnya. Selama 15 tahun, IAEA akan memantau sentrifugal Iran yang tersimpan dan infrastruktur terkait. Selama waktu ini, Iran juga akan mengizinkan IAEA akses harian ke fasilitas Natanz. Selama 20 tahun, Teheran akan memungkinkan agen untuk memverifikasi inventaris Iran komponen centrifuge tertentu dan fasilitas manufaktur untuk komponen tersebut. Selain itu, Iran akan memungkinkan IAEA untuk memantau pabrik uranium negara itu selama 25 tahun dan untuk memantau pabrik Iran untuk menghasilkan air berat. Seperti yang dicatat, Amano juga melaporkan bahwa, sejak Hari Implementasi, IAEA memverifikasi dan memantau implementasi Iran atas perusahaannya. komitmen terkait nuklir di bawah JCPOA(Kerr, Paul K.; Katzman, 2018).

c. Ketentuan Sanksi dalam JCPOA

Menyusul dikeluarkannya laporan IAEA yang memverifikasi implementasi tindakan-tindakan yang berhubungan dengan nuklir oleh Iran, sanksi PBB terhadap Iran dan beberapa sanksi UE akan berakhir dan sebagian akan ditangguhkan. Setelah sanksi dicabut, Iran akan memulihkan sekitar \$ 100 miliar asetnya (perkiraan

Departemen Keuangan Amerika Serikat) dibekukan di bank-bank luar negeri(Northam, 2015). Delapan tahun dalam perjanjian, sanksi Uni Eropa terhadap sejumlah perusahaan Iran, individu dan institusi (seperti Pengawal Revolusi) akan dicabut(Schwartz, 2015).

Amerika Serikat akan menghentikan penerapan sanksi sekunder terkait nuklirnya dengan tindakan presiden atau pengabaian eksekutif. Sanksi sekunder adalah sanksi yang menjatuhkan sanksi kepada negara lain untuk melakukan bisnis dengan Iran. Sanksi utama Amerika Serikat, yang melarang perusahaan Amerika Serikat melakukan transaksi komersial dengan beberapa pengecualian, tidak diubah oleh JCPOA. Langkah ini tidak terikat pada tanggal tertentu, tetapi diperkirakan akan terjadi kira-kira pada paruh pertama 2016(Collina et al., 2015).

Sanksi yang berkaitan dengan teknologi rudal balistik akan tetap selama delapan tahun sanksi serupa atas penjualan senjata konvensional ke Iran akan tetap selama lima tahun. Namun, semua sanksi Amerika Serikat terhadap Iran terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia, rudal, dan dukungan untuk terorisme tidak terpengaruh oleh perjanjian dan akan tetap berlaku. Sanksi Amerika Serikat dipandang lebih ketat, karena banyak yang memiliki efek ekstrateritorial (Diterapkan di seluruh dunia)(The White House Washington, n.d.).

Sanksi UE, sebaliknya, hanya berlaku di Eropa. Tidak ada sanksi baru terkait PBB atau UE atau tindakan pembatasan yang akan dikenakan. Jika Iran melanggar perjanjian, P5 + 1 mana pun dapat meminta provisi *snap back*, di mana sanksi *snap back* diberlakukan (Diterapkan kembali). Secara khusus, JCPOA menetapkan proses penyelesaian sengketa berikut: jika salah satu pihak dalam JCPOA memiliki alasan untuk percaya bahwa pihak lain tidak menjunjung tinggi komitmennya berdasarkan perjanjian, maka pihak yang mengadu dapat merujuk pengaduannya ke Komisi Bersama, sebuah badan yang dibentuk berdasarkan

JCPOA untuk memantau implementasi(Simeone & Kaple, 2015).

Jika keluhan yang dibuat oleh pihak non-Iran tidak diselesaikan untuk memuaskan pihak yang mengeluh dalam waktu tiga puluh lima hari rujukan, maka pihak tersebut dapat memperlakukan masalah yang belum terselesaikan sebagai alasan untuk berhenti melakukan komitmennya di bawah JCPOA dengan memberi tahu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Keamanan kemudian akan memiliki tiga puluh hari untuk mengadopsi resolusi untuk melanjutkan pencabutan sanksi. Jika resolusi semacam itu tidak diadopsi dalam waktu tiga puluh hari itu, maka sanksi dari semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan nuklir JCPOA secara otomatis akan diberlakukan kembali(Simeone & Kaple, 2015).

Iran telah menyatakan bahwa dalam kasus seperti itu, mereka akan berhenti melakukan kewajiban nuklirnya berdasarkan perjanjian tersebut. Efek dari peraturan ini adalah bahwa setiap anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia dan Perancis) dapat memveto pemberian sanksi yang sedang berlangsung, tetapi tidak ada anggota yang dapat memveto penerapan kembali sanksi. Sanksi Snapback tidak akan berlaku dengan efek retroaktif pada kontrak yang ditandatangani antara pihak mana pun dari individu atau entitas Iran sebelum tanggal aplikasi, dengan ketentuan bahwa kegiatan yang dimaksud dalam pelaksanaan kontrak tersebut konsisten dengan (Kagan, 2015).

B. Keikutsertaan Amerika Serikat di JCPOA

1. Era Barack Obama

Hubungan Kerja sama nuklir antara Amerika Serikat dengan Iran pertama kali pada era Presiden Shah Reza Pahlevi. Namun kerja sama ini tidak berjalan lama dikarenakan lengsernya Shah Reza Pahlevi dan terjadinya revolusi 1979 yang mana membuat hubungan diplomatic

Iran dan Amerika Serikat terputus. Setelah revolusi ini sentiment terhadap Iran sangatlah besar. Iran mendapatkan banyak sanksi akibat program nuklirnya, Iran menjadi terisolasi dari dunia luar akibat sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan terhadap Program nuklirnya. Program nuklir Iran telah meresahkan dunia internasional khususnya wilayah Timur Tengah. Komunitas internasional telah lama mencari perjanjian diplomatik penting dengan Iran mengenai program nuklirnya, dan perjanjian semacam itu juga merupakan tujuan kebijakan luar negeri yang lama dicari oleh pemerintahan Obama (Rhodan, 2015).

Sejak akhir 2011, Amerika Serikat telah menunjukkan minat untuk menyeimbangkan kembali kebijakan luar negerinya melalui *strategic pivot* menuju Asia. Untuk mencapai hal ini, pemerintahan Obama telah mencoba melepaskan diri dari wilayah tersebut dan mengembalikan Amerika Serikat ke tempat tradisionalnya bertindak sebagai penyeimbang offshore *balancer*. Dalam sebuah wawancara Trita Parsi, presiden Dewan Nasional Iran-Amerika dan penulis Treacherous Alliance mengatakan bahwa untuk mencapai *strategic pivot* menuju Asia, pemerintahan Obama pertama-tama perlu mengembangkan hubungan yang baik dengan Iran agar masalah di kawasan Timur Tengah dapat diselesaikan (Gibson, 2015).

Menyelesaikan masalah nuklir Iran selaras dengan sasaran strategis Amerika untuk kawasan tersebut, yang meliputi mencegah dominasi satu negara, menjaga minyak mengalir melalui Selat Hormuz dan ke pasar global, dan membatasi kehadiran militernya di wilayah tersebut, sambil memastikan kehadiran militernya di wilayah tersebut, sambil memastikan keamanan sekutu regionalnya di Teluk dan juga Israel. Kesepakatan nuklir akan mengurangi kemungkinan serangan militer Israel terhadap Iran. Kesepakatan ini juga dapat membawa minyak Iran kembali ke pasokan minyak global dan mencegah kemungkinan perlombaan senjata nuklir antara Iran dan Arab Saudi. Lebih penting lagi, ini dapat mengarah pada kerja sama pada isu-isu regional yang penting, seperti menahan bangkitnya Negara Islam,

menstabilkan perang saudara di Suriah, memerintah dalam terorisme di Pakistan, mencegah kemenangan Taliban di Afghanistan, dan melawan perdagangan heroin yang produktif di kawasan itu (Gibson, 2015).

Awal mula terbukanya pintu perundingan nuklir adalah ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Iran Hassan Rouhani melakukan sambungan telepon langsung pada akhir September 2013. Dalam percakapan bersejarah yang berlangsung selama lima belas menit itu menjadi babak baru bagi hubungan kedua negara yang sejak tiga dekade mengalami kebekuan. Tindak lanjut dari sambungan telepon Obama dan Rouhani adalah penjabakan sejumlah opsi perundingan yang melibatkan Sekretaris Negara John Kerry dan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif (Auliani, 2013).

Pada 14 Juli 2014 kesepakatan di bidang nuklir antara Iran dan Barat akhirnya tercapai. Beberapa saat setelah negosiasi menemukan hasil, Obama menggelar konferensi pers di Gedung Putih yang secara eksplisit menjelaskan bahwa tujuan dari negosiasi tersebut adalah agar persebaran senjata nuklir di kawasan Timur Tengah bisa dikontrol dan masyarakat internasional bisa memastikan bahwa Iran akan tunduk untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Pada saat bersamaan Obama ingin dikenang sebagai rezim yang telah berhasil menggunakan pendekatan diplomasi untuk menekan musuh yang berpotensi mendatangkan ancaman langsung bagi Amerika dan mengatakan untuk tidak bernegosiasi dibawah rasa takut, tetapi tidak takut untuk melakukan negosiasi dengan mengutip pernyataan mantan presiden John F. Kennedy, *“one more chapter in our pursuit of a safer, more helpful and more hopeful world let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate”* (Rofii, 2015).

Argumen yang disampaikan oleh Obama terkait perjanjian nuklir dengan Iran adalah agar Amerika terbebas dari potensi ancaman langsung terhadap keamanan nasional Amerika yang bisa datang dari negara yang memiliki senjata nuklir. Iran merupakan salah satu negara yang dicatat oleh

Amerika, terutama pada era Presiden George W. Bush sebagai negara yang harus diwaspadai dan diantisipasi. Bahkan, Bush memasukan Iran sebagai salah satu negara poros Setan “Axis of Evil” bersama Korea Utara dan Irak pada bulan Januari 2002 dan diucapkan berulang kali dalam acara resmi kenegaraan. Sikap keras Amerika terhadap Iran mendapat respon serupa dari pemimpin spiritual Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khomeini, yang menyebut Amerika sebagai “Setan Besar” dan Israel sebagai “Setan Kecil”(Rofii, 2015).

Lahirnya adagium-adagium ini secara sederhana menjelaskan dinamika hubungan Amerika-Iran yang tidak pernah membaik sejak peristiwa revolusi 1979. Obama hadir dengan pendekatan berbeda dalam menghadapi Iran, berhadapan dengan pemimpin Iran yang lebih moderat. Amerika di bawah kepemimpinan Obama mencoba untuk menggunakan pendekatan diplomasi untuk merubah haluan negara-negara yang selama ini menjadi musuh Amerika. Untuk alasan meninggalkan warisan kepemimpinan pada periode kedua kepemimpinannya, Obama memberi tugas khusus kepada John Kerry untuk membuka lembaran baru dengan negara-negara yang selama ini menutup pintu diplomatik dengan Amerika. Khusus untuk Iran, isu yang muncul di depan adalah kepemilikan nuklir dan embargo bidang ekonomi yang membuat Iran tidak bisa berbuat banyak dalam panggung perdagangan internasional(Rofii, 2015).

Meskipun demikian, niat Obama untuk menyelesaikan persoalan nuklir Iran tidak sepenuhnya berjalan mulus sebab ada sejumlah rintangan yang harus dilewati, baik di level internal maupun eksternal. Pada level internal bisa disebut sebagai dimensi politik domestik sebab pasca perundingan Vienna keputusan untuk menerima atau menolak hasil perundingan sangat ditentukan oleh anggota kongres dan senator Amerika yang didominasi oleh kubu Republik. Dalam komentar yang dibuat di Ruang Timur Gedung Putih pada 15 Juli 2015, Obama mendesak Kongres untuk mendukung perjanjian tersebut, dengan mengatakan Jika kita

tidak memilih dengan bijak, saya percaya generasi mendatang akan menilai kita dengan keras, karena membiarkan momen ini berlalu begitu saja(Harris & Shiear, 2015).

Pada 15 Juli, Wakil Presiden Joe Biden bertemu dengan Senat Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri di Capitol Hill, di mana ia membuat presentasi tentang perjanjian tersebut(Walsh & Barrett, 2015). Pada tanggal 18 Juli Obama mengabdikan alamat radio minggunya untuk perjanjian tersebut dengan mengatakan bahwa kesepakatan ini akan membuat Amerika dan dunia lebih aman dan membantah banyak argumen yang terlalu panas dan sering tidak jujur tentang hal itu dan sebagai komandan -in-chief Obama tidak membuat permintaan maaf untuk menjaga negara ini agar aman dan terjamin melalui kerja keras diplomasi dibandingkan dengan serbuan untuk berperang(Press Secretary, 2015). Pada tanggal 23 Juli Obama bertemu di Ruang Kabinet Gedung Putih dengan sekitar selusin *House* yang ragu-ragu. Demokrat berbicara tentang perjanjian dan mencari dukungan mereka(Weisman & Gordhon, 2015).

2. Era Donald Trump

Perjanjian yang sudah dibuat melalui negosiasi panjang ini, sayangnya tidak dapat bertahan lama. Ketika Obama digantikan oleh presiden Donald Trump, kesepakatan ini berada dalam ketidakpastian. Donald Trump adalah seorang kritikus vokal dari perjanjian JCPOA, Selama kampanye presiden 2016 Trump berjanji untuk berusaha menegosiasikan kembali, menegakkan secara tegas persyaratannya pada Iran, atau untuk membatalkannya langsung. Pada 10 Februari 2017, setelah pertemuan dengan Administrasi yang berfokus pada JCPOA, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri yaitu Frederica Mogherini, menyatakan bahwa pejabat Administrasi meyakinkan kepadanya bahwa Administrasi Trump bermaksud untuk sepenuhnya mengimplementasikan JCPOA. Namun awal tahun 2018, para pejabat Amerika

Serikat menyatakan meningkatnya permusuhan terhadap JCPOA.

Sekretaris Negara Rex Tillerson mengatakan kepada wartawan pada 19 April 2017, bahwa Administrasi Trump akan meninjau sepenuhnya JCPOA. Pejabat Administrasi Trump berpendapat bahwa Iran dapat mengejar senjata nuklir di masa depan. Tinjauan Postur Nuklir 2018 menegaskan bahwa Perkembangan kemampuan rudal balistik jarak jauh Iran semakin meningkat, dan strategi dan kegiatan agresifnya untuk menggoyahkan pemerintah-pemerintah tetangga, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen jangka panjangnya untuk melepaskan kemampuan senjata nuklir. Presiden Trump mengumumkan pada 13 Oktober 2017, bahwa Administrasi telah menyelesaikan ulasan kebijakan Iran yang dijelaskan di atas (Kerr, Paul K.; Katzman, 2018).

Sehubungan dengan JCPOA, Trump mengumumkan bahwa Pemerintahannya tidak akan mengeluarkan sertifikasi kepatuhan yang ditentukan oleh INARA (*Iran Nuclear Agreement Review Act*), dan ia akan mengarahkan pemerintahannya untuk bekerja sama dengan Kongres dan sekutu Amerika Serikat untuk mengatasi banyaknya kelemahan serius dari kesepakatan tersebut. Sekretaris Tillerson tidak membahas kepatuhan Iran, tetapi dia menulis dalam sebuah surat kepada Kongres pada hari yang sama bahwa dia tidak dapat menyatakan bahwa melanjutkan penangguhan sanksi Amerika Serikat adalah tepat dan proporsional dengan langkah-langkah spesifik dan dapat diverifikasi yang diambil oleh Iran sehubungan dengan penghentian program nuklir terlarangnya. Pemotongan sertifikasi di bawah INARA memungkinkan Kongres untuk bertindak berdasarkan undang-undang, berdasarkan prosedur yang dipercepat, menerapkan kembali sanksi-sanksi yang ditangguhkan (Kerr, Paul K.; Katzman, 2018).

Pada tanggal 8 Mei, Presiden Trump, mencatat bahwa kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Kemudian mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi berpartisipasi dalam JCPOA dan akan menerapkan kembali

sanksi yang telah ditangguhkan sesuai dengan JCPOA. Presiden Trump memerintahkan Sekretaris Negara Pompeo untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menghentikan partisipasi Amerika Serikat dalam JCPOA, dan bersama dengan Menteri Keuangan Steven Mnuchin. Amerika Serikat telah memberi tahu pihak P5 +1 lainnya dan menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi menghadiri pertemuan komisi bersama, kelompok kerja mengenai reaktor Arak, dan kelompok kerja pengadaan (Cherkaoui, 2018).

Bab II menemukan bahwa perjanjian JCPOA ini merupakan perjanjian yang sangat kontroversial di dunia. Keterlibatan Amerika Serikat dalam negosiasi ini juga menjadi pemicu negara lain untuk bergabung dalam perjanjian JCPOA ini. Namun, pergantian kepemimpinan Amerika Serikat ini menimbulkan perubahan arah politik luar negeri Amerika Serikat. Arah politik luar negeri Donald Trump berbeda dengan pemerintahan Barack Obama, era kepemimpinan Trump menunjukkan keengganan dalam perjanjian nuklir dengan Iran. Hal ini menjadi menarik untuk menelisik latar belakang keluarnya Donald Trump dari perjanjian JCPOA, hal ini akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.